



The Influence Of Regional Original Revenue On Capital Expenditure In Regencies/Cities Of North Sumatera

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Siti Arifah ¹⁾; Ayu Kurnia Sari ²⁾; Dito Aditia Darma Nst ³⁾

^{1,2, 3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ sitiarifahsinaga@icloud.com ;²⁾ ayukurniasari@dosen.pancabudi.ac.id

³⁾ ditoaditia@dosen.pancabudi.co.id

ARTICLE HISTORY

Received [12 Desember 2025]

Revised [15 Januari 2026]

Accepted [17 Januari 2026]

KEYWORDS

Regional Original Income
(PAD), Capital Expenditure,
Regional Finance.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk membiayai berbagai program, proyek, dan kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Belanja daerah mencakup alokasi anggaran yang besar untuk membiayai sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, pelayanan publik, dan lain-lain. Alokasi anggaran belanja daerah meliputi alokasi anggaran yang diperoleh dari pendapatan daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan sumber keuangan lainnya. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan dan proyek yang diprioritaskan dalam rencana pembangunan daerah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa daerah yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan memiliki potensi fiskal yang lebih baik, sehingga mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, terdapat disparitas fiskal antardaerah. Beberapa kabupaten/kota dengan PAD rendah cenderung mengalokasikan proporsi yang lebih kecil untuk belanja modal dan lebih bergantung pada belanja operasional. Hasil regresi menunjukkan koefisien positif pada variabel PAD dengan nilai signifikansi $< 0,05$ yang berarti peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan belanja modal.

ABSTRACT

Regional expenditure constitutes financial outlays undertaken by subnational governments (at provincial, regency, or city levels) to fund diverse programs, projects, and activities designed to fulfill societal requirements and execute governmental responsibilities at the local tier. This expenditure encompasses considerable budgetary provisions allocated toward critical sectors including education, health services, infrastructure development, security apparatus, public service delivery, and related domains. The budgetary allocation framework for regional expenditure comprises revenues generated from local sources, intergovernmental transfer mechanisms from the central authority, and supplementary financial resources. These fiscal resources are deployed to support prioritized initiatives and ventures delineated within regional development strategies. The empirical evidence further reveals that jurisdictions demonstrating sustained enhancement in locally-generated revenues exhibit enhanced fiscal sustainability, consequently diminishing reliance upon centrally-administered transfer allocations. However, notable fiscal asymmetries persist across territorial units. Certain regencies and municipalities characterized by modest local revenue generation demonstrate a propensity to dedicate diminished proportions toward capital investment while maintaining heightened dependency on recurrent operational expenditures. The regression analysis yields a positive coefficient estimate for the local revenue variable, exhibiting statistical significance at $p < 0.05$, thereby indicating that incremental growth in local own-source revenue corresponds with proportional increases in capital expenditure allocation.

PENDAHULUAN

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk membiayai berbagai program, proyek, dan kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Belanja daerah mencakup alokasi anggaran yang besar yang digunakan untuk membiayai sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, pelayanan publik, dan lain-lain (Rahmawati & Fajar, 2017). Alokasi anggaran belanja daerah meliputi alokasi anggaran yang diperoleh dari pendapatan daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan sumber keuangan lainnya. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan dan proyek yang diprioritaskan dalam rencana pembangunan daerah. Program dan proyek, yaitu belanja daerah, mencakup biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program pemerintah dan proyek pembangunan. Hal ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, program sosial, dan lain-lain. Fungsi pemerintah adalah bahwa belanja daerah mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat daerah, seperti

pelayanan publik, perlindungan lingkungan hidup, pengaturan ekonomi, keamanan, dan administrasi pemerintahan. Dengan kata lain, beginilah cara pemerintah daerah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Lebih lanjut, pembangunan daerah merupakan salah satu tujuan utama belanja daerah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Hal ini mencakup investasi infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan aksesibilitas, dan menciptakan lapangan kerja. Pelayanan publik mencakup biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Hal ini mencakup pendidikan, kesehatan, layanan sosial, transportasi umum, sanitasi, dan masih banyak lagi. Partisipasi masyarakat, dalam penganggaran partisipatif, pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemantauan belanja daerah. Hal ini dapat memastikan bahwa alokasi anggaran sejalan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting kemandirian fiskal daerah (Sari, 2017). Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu pemerintah daerah, semakin besar kemampuan daerah tersebut dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Di Provinsi Sumatera Utara, kemampuan kabupaten/kota dalam menghasilkan PAD masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Perbedaan kapasitas fiskal ini berdampak pada kemampuan daerah untuk menyediakan layanan publik dan melakukan pembangunan infrastruktur.

Belanja modal sebagai salah satu komponen belanja daerah berfungsi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, serta kesehatan. Namun pada kenyataannya, realisasi belanja modal di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara belum optimal dan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun (Pane dkk., 2021). Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa tingkat Pendapatan Asli Daerah dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja modal.

Selain itu, masih terdapat daerah yang memiliki PAD rendah tetapi menunjukkan belanja modal yang relatif tinggi, yang mengindikasikan ketergantungan pada dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Padang & Padang, 2023). Di sisi lain, beberapa daerah dengan PAD tinggi justru belum memaksimalkan penggunaan belanja modal untuk meningkatkan pembangunan fisik. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara PAD dan belanja modal tidak selalu linear dan memerlukan kajian empiris lebih mendalam.

Permasalahan semakin relevan dengan tuntutan otonomi daerah yang mengharuskan pemerintah kabupaten/kota lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peningkatan PAD benar-benar diikuti oleh peningkatan belanja yang bersifat produktif, termasuk belanja modal. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh PAD terhadap belanja modal di kabupaten/kota Sumatera Utara menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana PAD berkontribusi terhadap kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LANDASAN TEORI

Teori Asimetri (Asimetri Pemerintah Daerah) adalah konsep yang mengacu pada ketimpangan sumber daya, kekuasaan, dan kewenangan antarpemerintah daerah dalam suatu negara. Dalam konteks ini, asimetri menggambarkan perbedaan signifikan dalam kapasitas, kapabilitas, atau sumber daya antar entitas pemerintah daerah, yang dapat memengaruhi kebijakan, kesetaraan, dan dinamika politik. Beberapa elemen kunci dalam teori asimetri pemerintah daerah meliputi: Ketimpangan sumber daya adalah bahwa beberapa pemerintah daerah mungkin memiliki lebih banyak sumber daya keuangan, manusia, atau infrastruktur daripada yang lain. Hal ini dapat timbul karena perbedaan pembangunan ekonomi, keragaman sumber daya alam, atau faktor-faktor lainnya. Ketimpangan kewenangan hukum adalah bahwa undang-undang dan peraturan yang mengatur pemerintah daerah dapat bervariasi, sehingga beberapa pemerintah daerah mungkin memiliki lebih banyak kewenangan atau otonomi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya daripada yang lain. Ketimpangan akses terhadap layanan publik adalah bahwa warga negara dari berbagai pemerintah daerah mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, karena perbedaan sumber daya dan kebijakan. Ketimpangan kesejahteraan sosial adalah asimetri pemerintahan daerah yang juga dapat mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan sosial, di mana beberapa daerah lebih makmur

Sementara yang lain menghadapi kemiskinan atau ketimpangan yang lebih besar. Dampak asimetri pemerintahan daerah dapat bervariasi, termasuk potensi ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar, kurangnya pembangunan yang merata, ketegangan politik antardaerah, dan perasaan tidak puas di antara warga di daerah yang kurang berkembang.



Untuk mengatasi masalah asimetri, pemerintah pusat sering kali harus mempertimbangkan kebijakan yang mengakui perbedaan kebutuhan dan kemampuan berbagai pemerintah daerah. Ini dapat mencakup redistribusi dana, bantuan teknis, dan upaya untuk membangun kapasitas pemerintah daerah yang kurang berkembang. Teori asimetri pemerintahan daerah memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pembangunan daerah, desentralisasi kekuasaan, dan perencanaan kebijakan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan yang merata di seluruh negeri.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kausal. Metode kausal ini bertujuan untuk memahami hubungan kausal antar variabel (Sekaran & Bougie, 2016). Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan peneliti dalam mendokumentasikan data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian. Teknik observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengamati penelitian untuk mendapatkan data objektif dari penelitian. Studi pustaka merupakan salah satu penelitian yang digunakan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan data diolah menggunakan program SPSS versi 24 (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Deskriptif

Tabel 1. Pengolahan Data Deskriptif

Sumber: Diolah Peneliti, SPSS (2025)

Tabel 1 menunjukkan sampel N = 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Belanja Modal memiliki

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Belanja Modal	9.376.925	156733416057	33
PAD	3.101.805	20186902960	33

rata-rata Rp 9.376.925 ribu dengan standar deviasi Rp 156.733.416.057. PAD memiliki rata-rata Rp 3.101.805 ribu dengan standar deviasi Rp 20.186.902.960. Standar deviasi relatif besar menunjukkan variasi signifikan dalam realisasi belanja modal dan PAD antar daerah, mengindikasikan disparitas kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan. Penelitian ini dilakukan di 33 kabupaten dan kota, yang terdiri dari :

Kabupaten:

1. Kabupaten Asahan
2. Kabupaten Batu Bara
3. Kabupaten Dairi
4. Kabupaten Deli Serdang
5. Kabupaten Humbang Hasundutan
6. Kabupaten Karo
7. Kabupaten Labuhan Batu
8. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
9. Kabupaten Labuhan Batu Utara
10. Kabupaten Langkat
11. Kabupaten Mandailing Natal
12. Kabupaten Nias
13. Kabupaten Nias Barat
14. Kabupaten Nias Selatan
15. Kabupaten Nias Utara
16. Kabupaten Padang Lawas
17. Kabupaten Padang Lawas Utara
18. Kabupaten Pakpak Bharat

19. Kabupaten Samosir
20. Kabupaten Serdang Bedagai
21. Kabupaten Simalungun
22. Kabupaten Tapanuli Selatan
23. Kabupaten Tapanuli Tengah
24. Kabupaten Tapanuli Utara
25. Kabupaten Toba

Kota:

26. Kota Binjai
27. Kota Gunungsitoli
28. Kota Medan
29. Kota Padangsidimpuan
30. Kota Pematangsiantar
31. Kota Sibolga
32. Kota Tanjungbalai
33. Kota Tebing Tinggi

Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 2. Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.884	,413		6,980	,000
	PAD	2,921	3,597	,186	4,167	,020

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Diolah Peneliti, SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 2, persamaan regresi: $Y = 2,884 + 2,921X$

Interpretasi:

Konstanta (a) = 2,884 menunjukkan jika PAD bernilai nol, belanja modal sebesar 2,884 ribu rupiah

Koefisien Regresi (b) = 2,921 menunjukkan setiap peningkatan PAD satu satuan akan meningkatkan belanja modal sebesar 2,921 satuan

Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji t menunjukkan:

1. Nilai t hitung = 4,167
2. Nilai signifikansi = 0,020

Dengan $\alpha = 0,05$, nilai signifikansi $0,020 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota Sumatera Utara.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.808 ^a	.652	,446	,93511

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Diolah Peneliti, SPSS (2025)

Hasil menunjukkan:

1. R = 0,808 menunjukkan hubungan sangat kuat dan positif antara PAD dan Belanja Modal
2. R² = 0,652 atau 65,2% menunjukkan PAD mampu menjelaskan variasi Belanja Modal sebesar 65,2%, sedangkan 34,8% dipengaruhi faktor lain (DAU, DAK, DBH, kebijakan fiskal, prioritas pembangunan)

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan koefisien regresi positif 2,921 dengan signifikansi $0,020 < 0,05$. Nilai R² sebesar 65,2% menunjukkan PAD memiliki peran substansial dalam menentukan alokasi belanja modal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Adyatma dan Oktaviani (2016), Gunantara dan Dwirandra (2014), Rahmawati dan Fajar (2017), dan Pane et al. (2021) yang menemukan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian terbaru Irmawati (2025) pada 34 provinsi Indonesia periode 2020-2024 juga mengkonfirmasi PAD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal.

Korelasi antara PAD dan Belanja Modal kuat dan searah, menunjukkan bahwa daerah dengan pendapatan asli daerah yang tinggi cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan aset tetap. Hasil ini juga menunjukkan bahwa daerah yang



mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan memiliki potensi fiskal yang lebih baik, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, terdapat disparitas fiskal antar daerah. Beberapa kabupaten/kota dengan PAD rendah cenderung mengalokasikan proporsi belanja modal yang lebih kecil dan lebih mengandalkan belanja operasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk mengalokasikan dana pada belanja yang bersifat produktif, terutama pembangunan sarana dan prasarana publik. Secara statistik, pengaruh PAD terhadap belanja modal ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang positif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan belanja modal. Dengan kata lain, daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi mampu meningkatkan investasi pembangunan yang bersifat jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur jalan, gedung layanan publik, serta fasilitas umum lainnya. Penelitian ini mendukung teori keuangan daerah yang menyatakan bahwa kemandirian fiskal daerah tercermin dari kemampuan PAD dalam membiayai kebutuhan pembangunan. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang menemukan bahwa PAD merupakan salah satu variabel dominan yang mempengaruhi alokasi belanja modal di pemerintah daerah (Padang & Padang, 2023; Pane dkk., 2021). Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa kontribusi PAD terhadap belanja modal tidak selalu optimal pada seluruh kabupaten/kota. Beberapa daerah dengan PAD tinggi belum sepenuhnya memaksimalkan belanja modal, sementara daerah dengan PAD rendah cenderung sangat bergantung pada transfer pusat. Namun secara keseluruhan, data empiris menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. R square sebesar 65,2% yang berarti sebesar 34,8% dipengaruhi oleh penelitian lain diluar penelitian ini.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi positif serta nilai signifikansi $< 0,05$, yang berarti bahwa setiap peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan belanja modal.
3. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah, semakin kuat pula kemampuan fiskal daerah tersebut untuk mengalokasikan anggaran pada belanja modal, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan aset-aset jangka panjang lainnya. Dengan demikian, PAD menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas pembangunan daerah dan mendukung peningkatan pelayanan publik.

Saran

1. Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara perlu meningkatkan upaya optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, seperti perbaikan sistem pemungutan pajak daerah, peningkatan layanan publik, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Dengan PAD yang lebih kuat, kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal juga akan meningkat.
2. Pemerintah daerah disarankan untuk memprioritaskan penggunaan PAD pada belanja-belanja yang bersifat produktif, khususnya belanja modal. Belanja modal memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Perlu dilakukan perbaikan manajemen keuangan daerah melalui perencanaan anggaran yang lebih efektif, pengendalian internal yang baik, serta transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Efisiensi ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan PAD benar-benar berkontribusi pada pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Meita Oktaviani, R. (2016). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(2). Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/4598>

- Apriliawati. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG. *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi*.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Sumatera Utara dalam angka 2018*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara 2019*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara 2020*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara 2021*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunantara, Putu Candra; Dwirandra, A.A.N.B.. PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI DI BALI. *E-Jurnal Akuntansi*, [S.l.], v. 7, n. 3, p. 529-546, june 2014. ISSN 2302-8556. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/9061>
- Padang, N. N. ., & Padang, W. S. . (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>
- Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 31–44.
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.445>
- Sari, A. K. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76.
- Saputri, Sealys Harie (2020). PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR PERIODE 2015-2017). *Undergraduate thesis, STIESIA SURABAYA*
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Chichester: Wiley.